

ANALISIS SOAL

Mata Kuliah	: Pendidikan Kewarganegaraan
Kode Mata Kuliah	: UNI620107
Jumlah SKS	: 2 SKS
Semester/Kelas	: 2/B
Dosen Pengampu	: 1. Drs.Rapani,M.Pd. 2.Siti Nuraini,M.Pd.

DISUSUN OLEH :
Putri Lambang Purnaningsih (2213053054)



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022/2023**

Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab

1. Hal positif yang dapat diambil dalam artikel tersebut adalah terdapat adanya kekompakan rakyat dalam mengajukan aspirasi mereka guna mengupayakan kepentingan kelompok mereka, dengan adanya permasalahan mengenai Undang-Undang Cipta kerja yang dirasa sangat merugikan masyarakat Indonesia, sehingga mereka mengumpulkan suatu kelompok masyarakat guna mensuarakan aspirasi mereka untuk kepentingan kelompok, hal tersebut tanpa disadari menumbuhkan jiwa nasionalisme dimana lebih mengutamakan kepentingan kelompok dari pada kepentingan pribadi.

Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu atas pelanggaran konstitusi yang ada di negara kita negara Indonesia, perlu untuk wakil rakyat dalam memutuskan keputusan terutama UU cipta kerja untuk lebih transparansi dan menimbang apakah dengan

diundangkan UU Cipta Kerja akan lebih membuat masyarakat lebih sejahtera atau bahkan sebaliknya yaitu lebih menyiksa. Apalagi dengan Indonesia menganut paham demokrasi dimana kekuasaan penuh di tangan rakyat, tetapi pada tragedi tersebut justru tidak mempertimbangkan suara rakyat, sehingga dampaknya masyarakat merasa aspirasinya tidak di dengar oleh wakil mereka dan berakhir turun ke jalan untuk berdemonstrasi dengan hal tersebut pula dapat memicu kerusakan fasilitas-fasilitas yang ada.

2. Konstitusi adalah dokumen tertulis yang menetapkan dasar-dasar hukum dan aturan main bagi sebuah negara atau organisasi. Hakikat dari konstitusi adalah memberikan dasar hukum yang jelas dan mengatur hak dan kewajiban bagi semua warga negara, serta menetapkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Konstitusi juga menjamin hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar karena berbagai alasan, antara lain:

- a) Menetapkan dasar hukum: Konstitusi memberikan dasar hukum yang jelas dan merinci kewenangan dan tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama.
- b) Menjaga stabilitas dan keamanan: Konstitusi membantu menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara dengan memberikan pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga pemerintah dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- c) Menjamin kebebasan individu: Konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, serta melindungi individu dari diskriminasi.
- d) Meningkatkan kepercayaan publik: Konstitusi juga meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara karena memberikan jaminan hukum dan mengatur tata cara pelaksanaan kekuasaan.

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai konstitusi negara. UUD NRI 1945 menetapkan dasar hukum dan aturan main bagi Indonesia sebagai negara, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Melalui UUD NRI 1945, Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merumuskan tata cara penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk mematuhi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dan menjaga kestabilan serta keamanan negara melalui pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:

- a) Menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
- b) Mengabaikan hak asasi manusia atau melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
- c) Melanggar prinsip-prinsip konstitusi, seperti tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang dan mempersempit ruang demokrasi.
- d) Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Perilaku-perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan merugikan negara dan rakyat. Pejabat negara yang

melakukan tindakan tersebut harus diproses secara hukum dan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Namun, dalam hal ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan kembali berkontribusi positif bagi negara setelah menjalani hukuman yang sesuai.

Hal ini dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan pembinaan agar pejabat negara tersebut kembali memahami dan mematuhi prinsip-prinsip konstitusi serta menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab.